

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- a. Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- b. Tugas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik serta Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- c. Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Persandian dan Bidang Statistik;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik;
  - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

d. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi, Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data, Alasan)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Transformasi Layanan Pemerintah Daerah berbasis Digital	Indeks Pemerintah Digital	<p><b>Formulasi Pengukuran :</b> Berkonsentrasi pada kesiapan, kualitas tata kelola, layanan, dan infrastruktur digital, termasuk penguatan teknologi digital, keamanan siber, layanan publik digital, dan kepuasan pengguna. Penilaian dilakukan oleh Menpan RB.</p> <p><b>Tipe Penghitungan : Tahunan</b></p> <p><b>Sumber Data :</b> Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Kominfotik Prov. NTB.</p> <p><b>Alasan :</b> Mengukur kinerja transformasi digital instansi pemerintah dan mendorong inovasi.</p>
		Indeks Keamanan Informasi	<p><b>Formulasi Pengukuran :</b> Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi.</p> <p>Assesment indeks KAMI dilakukan setiap tahun oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).</p> <p>Evaluasi ini dilakukan terhadap beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2022.</p> <p>Area yang menjadi target evaluasi Indeks KAMI, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tata Kelola</li> <li>2. Pengelolaan Resiko</li> <li>3. Kerangka Kerja Keamanan Informasi</li> <li>4. Pengelolaan Aset</li> <li>5. Teknologi dan Keamanan informasi</li> <li>6. Perlindungan Data Diri.</li> </ol>

			<p>7. Pengamanan Keterlibatan P. Ketiga</p> <p><b><u>Tipe Penghitungan</u></b> : Tahunan.  <b><u>Sumber Data</u></b> : BSSN, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Dinas Kominfotik.  <b><u>Alasan</u></b> :  Indeks KAMI dilakukan untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan instansi.</p>
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	<p><b><u>Formulasi Pengukuran</u></b> :  Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dinilai oleh Komisi Informasi (KI) Pusat dan KI Provinsi, yang melibatkan tim ahli di tingkat nasional dan daerah.  <b><u>Tipe Penghitungan</u></b> : Tahunan  <b><u>Sumber Data</u></b> : Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikas, Dinas Kominfotik.  <b><u>Alasan</u></b> :  1. Mengukur tingkat keterbukaan informasi publik di Indonesia berdasarkan data dan informasi terkait implementasi UU KIP  2. Mendorong pemerintah daerah dan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi.  3. Membantu penyusunan arah kebijakan nasional terkait keterbukaan informasi publik.</p>
		Indeks Pembangunan Statistik	<p><b><u>Formulasi Pengukuran</u></b> :  Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran yang menilai tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia (SDI) di instansi pemerintah, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.  <b><u>Tipe Penghitungan</u></b> : Tahunan  <b><u>Sumber Data</u></b> : Bidang Statistik, Dinas Kominfotik Prov. NTB.  <b><u>Alasan</u></b> :  Menilai seberapa baik instansi pemerintah dalam menyelenggarakan statistik dan Satu Data Indonesia.</p>

Mataram, Januari 2026

Kepala Dinas  
Komunikasi Informatika Dan Statistik  
Provinsi Nusa Tenggara Barat



**Dr. H. Ahsanul Halik, S.Sos., M.H.**  
Pembina Utama Madya /IV d  
NIP. 19701231 199803 1 069